

Konfigurasi Politik dan Problem Identitas Menjelang Pemilihan Presiden 2024

Firdaus Muhammad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: firdaus.muhammad@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Politik identitas cukup mewarnai dinamika politik Indonesia 10 tahun terakhir ini. Artikel ini berusaha menjelaskan tentang politik identitas dan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024. Artikel ini dijelaskan secara kualitatif dengan berbasis pada studi kepustakaan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa politik identitas tidak hanya di level nasional, akan tetapi di ranah lokal juga mulai merebak dengan menggunakan identitas sebagai instrumen dalam kontestasi politik, baik identitas agama maupun etnisitas. Begitupun pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 dan Pilkada DKI Jakarta menjadi bukti bahwa politik identitas yang dibawa masuk ke ranah politik telah memecah belah anak bangsa dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Pilpres 2024, sekalipun Anies Baswedan diusung oleh NasDem dan membawa kekhawatiran baru terkait polarisasi politik, akan tetapi bergabungnya Muhaimin Iskandar dan PKB yang diusung koalisi perubahan, telah memberi secercah harapan bahwa Pilpres 2024 tidak semengkhawatirkan sebagaimana dibayangkan. Mengingat Muhaimin Iskandar dan PKB selama ini dicitrakan mengusung politik kebangsaan dan keindonesiaan.

Kata Kunci :

Politik Identitas, Konfigurasi, Pilpres 2024

PENDAHULUAN

Realitas politik identitas merupakan realitas yang tidak dapat dibicarakan secara sederhana apalagi dipinggirkan. Politik identitas telah menjadi bagian dari politik masyarakat Indonesia. Pengalaman Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 dan Pemilihan Presiden tahun 2019 yang kita saksikan langsung baik di media massa maupun media online telah menunjukkan betapa politik identitas

memberikan dampak dan implikasi yang cukup besar. Masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu, yakni kubu ‘cebong’ dan ‘kampret’ yang memperlihatkan bagaimana praktik politik identitas mampu mengakibatkan disintegrasi tidak hanya pada kalangan elit politik, tetapi juga pada masyarakat akar rumput. Meskipun perkara politik identitas tidak semenakutkan di negara Amerika dan Eropa, tetapi hal ini harus tetap diwaspadai (Mulyana, 2023).

Hampir setiap saat kita dapat menemukan pembicaraan soal ini di ruang publik termasuk di ruang media sosial. Data menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki keyakinan sekaligus kekhawatiran tentang praktik politik identitas yang masih muncul pada saat Pemilihan Presiden tahun 2024 (Paat, 2022). Data ini jelas mempertegas bahwa politik identitas telah menembus ke dalam alam bawah sadar politik masyarakat Indonesia.

Persoalan politik identitas semacam ini tampaknya berpotensi terus berlanjut saat partai Nasional Demokrat atau NasDem telah mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Kekhawatiran tentang potensi politik identitas tidak terlepas dari pengalaman sebelumnya yang menunjukkan kemenangan Anies Baswedan pada saat Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017-2022 yang diduga kuat memainkan politik identitas oleh para tim pendukung Anies Baswedan (Lestari, 2019). Akibatnya profil Anies Baswedan kemudian banyak mengarah pada citra politik identitas ini. Menyebutkan nama Anies Baswedan seolah tidak dapat dilepaskan dengan urusan politik identitas meskipun di momen lain tidak jarang selalu menolak pendapat atau pandangan tersebut (CNN Indonesia, 2023).

Tulisan ini ingin fokus pada persoalan politik identitas. Terpilihnya Anies Baswedan sebagai kandidat calon Presiden dari Partai Nasional Demokrat atau NasDem

seolah memperlihatkan dugaan politik identitas kembali akan dimainkan dalam Pemilihan Presiden tahun 2024. Dengan kata lain, Anies Baswedan berpotensi memiliki peran signifikan terhadap artikulasi politik identitas. Politik identitas bukan semata memiliki simbol artifisial, tetapi juga mempunyai makna yang determinan dan selalu diperebutkan. Politik identitas merupakan situs perjuangan yang cukup penting dalam memperlihatkan banyak hal tentang sikap politik, kelas, gender, dan pembagian sosial lainnya. Selain itu, menekankan perkara politik identitas dapat memperlihatkan pandangan masyarakat tentang hal ini dan peluangnya dalam berbagai momen politik di pemilihan kepala daerah di kemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai tulisan tentang politik identitas telah banyak diteliti dan didiskusikan. Kocu dan Tjahjoko menemukan bahwa politik identitas yang terjadi di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat didorong oleh tuntutan martabat dan kebencian, siasat elit dengan membangun narasi 'harga diri' sub-identitas, kesadaran sub-identitas lebih kuat dibandingkan identitas lain, dan Bupati Maybrat yang senantiasa membawa sentimen identitas dalam praktik politiknya (Kocu & Tjahjoko, 2022). Sementara itu, Sujito menjelaskan bahwa politik identitas lahir dari liberalisme politik yang cenderung kebablasan karena tidak dipandu dengan baik oleh nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan munculnya politik identitas multikultural, rasial, dan

keagamaan semata (Sujito, 2022). Terakhir, Firdaus dan Adriyani memaparkan bahwa demi membangun citra diri dan menegakkan harga diri, maka politik identitas dihadirkan dalam upaya mencapai hal tersebut. Karena itu, tidak sedikit para pemilih memilih para calon pemimpin politiknya yang memiliki latar belakang yang sama (Firdaus & Andriyani, 2021).

Dengan melihat pokok masalah di atas bahwa politik identitas merupakan bagian integral yang kini cenderung tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik masyarakat Indonesia dan bahkan telah menjadi preferensi utama dalam menentukan sikap politik, maka studi ini memiliki tujuan untuk mencari tahu artikulasi politik identitas pasca pencalonan Anies Baswedan sebagai Presiden tahun 2024 di berbagai media massa dan media online dan mengidentifikasi kecenderungan posisi Anies Baswedan dalam artikulasi politik identitas tersebut.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas ini dapat tumbuh apabila ada aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru. Diman identitas demikian dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi struktur masyarakat secara kese-

luruhan (Alfaqi, 2015). Menurut Haboddin, politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak (Haboddin, 2012). Hal semacam ini biasanya kita temukan ketika sekelompok aktivis feminisme berusaha membentuk identitas baru perempuan, menegosiasikan posisi perempuan dalam masyarakat, dan akhirnya merubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang peranan perempuan (Alfaqi, 2015).

Menurut Yeni Sri Lestari, kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing kelompok atau golongan sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas di Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Pembiaran terhadap konflik yang dilatarbelakangi oleh politik identitas yang beragam akan menciptakan ketidakstabilan negara (Lestari, 2018).

Agnes Heller memberikan penjelasan bahwa politik identitas difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*) walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya politik identitas juga dapat mencakup rasisme, bio-feminisme,

enviromentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis (Al-Farisi, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjelaskan fenomena politik Identitas di Indonesia. Sementara itu sumber-sumber Pustaka digunakan sebagai bahan dalam mengumpulkan data penelitian. Peneliti mengkaji literatur yang tersebar seperti artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal, begitupun laporan penelitian yang tersedia dan pemberitaan media yang dianggap relevan dengan studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi: Politik Identitas dan Problem Multikulturalisme

Politik identitas belakangan menjadi stigma dalam bingkai politik menjelang pemilihan presiden 2024. Sementara itu, problem demokrasi belum terurai ihwal mencari titik temu agama, demokrasi, dan multikulturalisme dalam konteks keindonesiaan. Diyakini masing-masing memiliki titik temu dan relasi yang saling menguatkan secara objektif. Hal itu dapat diwujudkan jika kesadaran mempertemukannya secara integral, melihat titik kesamaan dan bukan titik perbedaan. Sebab agama, demokrasi dan multikulturalisme berdiri masing-masing dalam konstruk epistemologisnya, namun bisa diintegrasikan tanpa membenturkannya.

Realitas kehidupan beragama, berdemokrasi dan komitmen memelihara nilai-nilai multikulturalisme masih simpang siur.

Problemnya terletak pada indikasi kegagalan negara “membaca” realitas tersebut. Sejumlah pengalaman menunjukkan hal itu, betapa kekerasan beragama terjadi akibat kebebasan berdemokrasi, bahkan wajah multikultural sebagai basis sosial tercederai, sejumlah daerah mengalami konflik sosial berbasis etnis, pengalaman Papua sebagai contoh pertanda buruknya kinerja negara dalam merawat multikulturalisme.

Keinginan mewujudkan negara demokratis, justru melahirkan radikalisme agama dan kegaduhan konflik yang mengendor--kan tali multikulturalisme. Karena itu, realitas negara menjadi kian keropos yang mesti dilakukan rekonstruksi bernegara dengan merajut kembali relasi agama, demokrasi, dan multikulturalisme sebagai spirit bernegara yang ideal.

Dalam konteks itu, masing-masing varian tersebut memiliki problemnya masing-masing. Misalnya, problem agama dalam kaitannya dengan demokrasi acapkali diperhadap-hadapkan. Fenomena radikalisme agama, terorisme, kekerasan lainnya yang mengatasnamakan agama. Realitas beragama yang sarat dengan paradoks-paradoks itu menjadi cerminan betapa problem beragama menjadi soal dalam lanskap politik Indonesia. Sementara itu, problem beragama dapat diurai, misalnya, dalam internal umat Islam. Demarkasi antara Islam yang satu dengan Islam yang lainnya acapkali berbenturan. Hal ini menjadi bagian yang diulas KH. Abdurrahman Wahid dalam buku; *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Menurutnya,

Islam acapkali dibagi menjadi dua bagian, yakni Islam formal dan Islam nonformal. Dalam pandangan formal, Islam selalu menjadi aturan bernegara. Formalisasi ini mengancam kebersamaan umat Islam karena negara akan menerapkan mazhab tertentu menjadi undang-undang, sementara mazhab versi lain berada di luar undang-undang yang ditetapkan sehingga yang benar dan salah tergantung pada undang-undang tersebut (Wahid, 2006). Hal ini tentunya berpotensi lahirnya konflik internal yang melahirkan paradoks dan ironi beragama di Indonesia.

Konfigurasi Peta Politik 2024: Tentang Identitas?

Konstelasi politik nasional menjelang Pemilu 2024 semakin dinamis ditandai pelbagai manuver partai melalui koalisi yang memaketkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bentuk komunikasi politik dalam menentukan *positioning* pada Pilpres 2024. Dalam kontestasi politik yang semakin kompetitif menuntut partai menaikkan *bargaining position* di tengah konfigurasi politik. Dalam konteks ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin inovatif dalam melakukan penguatan partai.

Ikhtiar politik berbasis keummatan, Nahdliyin, sejatinya PKB melakukan langkah strategis sebagai upaya penguatan agenda politik ke depan. Dalam hal ini, PKB dituntut menunaikan agenda politik secara sistematis dan terukur. Diantaranya, mendeteksi kekuatan politik berbasis pada geopolitik untuk mengukur *positioning* partai untuk meraup suara signifikan.

Modal sosial politik PKB berpijak pada kantong-kantong suara NU. *Bargaining position* PKB yang semakin kokoh dengan menjadi bagian dalam pemerintahan Jokowi-JK ataupun Jokowi-Ma'ruf Amin, melampaui prestasi politik era sebelumnya. Keterlibatan sejumlah elite PKB dalam jajaran kepengurusan PBNU menjadi langkah politik strategis untuk mendekatkan PKB dengan basis NU, sekalipun tetap harus dibentangkan garis demarkasi antara politik praktis PKB dan politik kebangsaan NU.

Sementara itu, posisi PKB dalam takaran geopolitik masih berbasis kuat di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur dan beberapa sebaran basis Nahdliyin lainnya seantero nusantara. Namun sebaran suara PKB masih berpusat di Jawa Timur sehingga perlu inovasi kreatif dan transformatif untuk penguatan kantong-kantong suara PKB di daerah lain, terutama luar Jawa.

Ikhtiar politik PKB dalam kendali Muhaimin Iskandar, berhasil membangun basis-basis politik dengan strategi penguatan pada identitas politik kesantrian. Upaya merawat dan penguatan basis yang “diimami” Muhaimin Iskandar dan implementasinya melalui infrastruktur partai di cabang-cabang di tanah air melalui kegiatan; Nusantara Mengaji, Lomba Baca Kitab Kuning dan Hari Santri.

Serangkaian kegiatan berskala nasional tersebut berhasil memantik dan memancing identitas politik kaum santri yang merupakan basis Nahdliyin, basis utama

PKB. Gema Nusantara Mengaji menjangkau seantero nusantara sehingga identifikasi politik PKB dianggap istiqamah pada jalur politik santri. Tetapi, karakteristik politik PKB bukan hanya pada penguatan keislaman, namun juga mengintegrasikannya dengan isu-isu nasionalisme. PKB tidak berpolitik gaya sekuler, juga tidak semata berbasis keagamaan, tetapi memadukannya menjadi pandangan politik yang moderat. Politik santri yang moderat tersebut dilhami dari spirit pemikiran politik kebangsaan NU.

Prestasi politik yang prestius yang diraih PKB dalam komando Muhaimin Iskandar adalah pada pilihan politik yang tepat ditandai sejumlah kader PKB masuk dalam kabinet Jokowi-JK dan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan *bargaining position* tinggi, ditandai posisi menterinya aman dari *resuffle*. Strategi politik PKB yang mengawal Jokowi sejak awal kampanye pilpres dan kemampuan merawat posisi di pemerintahan menjadi dalil yang mempertegas kemampuan komunikasi politik elite PKB semakin meyakinkan dan diperhitungkan.

Kerja-kerja politik yang sistematis dan terukur melalui pilkada hingga pemilu menjadi tantangan konsistensi politik PKB, utamanya dalam merawat basis suaranya untuk meraih *positioning* sebagai pemenang pemilu kelak, semua tergantung pada komitmen elite politik PKB dalam mengawal visi misi partai, menjaga marwah politik yang diwariskan ulama serta mengawal kaderisasi yang ekspansif seantero nusantara dengan pengawasan

kuat pada basis suaranya serta merambah potensi suara secara nasional. Dalam noktah ini, PKB semakin diperhitungkan konstituen dan mitra politiknya dalam konfigurasi peta politik pemilu 2024 sebagai era baru kebangkitan politik kaum santri-nasionalis.

Namun demikian, bersatunya PKB dan NasDem dengan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 memunculkan pertanyaan baru, apakah politik identitas tidak akan menguat kembali atau justru bergabungnya kedua kekuatan ini akan memudahkan wacana politik identitas dalam lanskap politik Indonesia? Mengingat Anies Baswedan dicitrakan sebagai politisi yang kerap memainkan politik identitas dengan berkaca pada pengalaman Pilkada DKI Jakarta. Sementara itu, Muhaimin Iskandar dan PKB merupakan antitesa dari politik identitas yang mengusung politik kebangsaan.

KESIMPULAN

Politik identitas cukup mewarnai dinamika politik Indonesia 10 tahun terakhir ini. Tidak hanya di level nasional, akan tetapi di ranah lokal juga mulai merebak dengan menggunakan identitas sebagai instrumen dalam kontestasi politik, baik identitas agama maupun etnisitas. Pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 dan Pilkada DKI Jakarta telah mengonfirmasi bahwa persolan identitas yang dibawa masuk ke ranah politik telah memecah belah anak

bangsa dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Diusungnya Anies Baswedan pada Pilpres 2024 oleh NasDem telah membawa kekhawatiran baru, bahwa polarisasi saat Pilkada DKI Jakarta dapat terulang, mengingat citra Anies Baswedan yang dianggap identic dengan politik identitas. Namun demikian, bergabungnya Muhaimin Iskandar dan PKB yang diusung koalisi perubahan, telah memberi secerah harapan bahwa Pilpres 2024 tidak semengkhawatirkan sebagaimana dibayangkan. Mengingat Muhaimin Iskandar dan PKB selama ini dicitrakan mengusung politik kebangsaan dan keindonesiaa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2*, 111-116.
- Al-Farisi, L. S. (2022). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi, Vol. 10 No. 2*, 77-90.
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama dan Etnis di Indonesia. *INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global, Vol.2, No.2*.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan, Vol.3, No.1*, 116-134.
- Kocu, J. R., & Tjahjoko, G. T. (2022). Politik Identitas Dalam Birokrasi di Kabupaten Maybrat. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG), Vol.6, No.1*, 84-87.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *Jurnal SIMULACRA, Vol.2, No.1*, 31-37.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama . *Journal of Politics and Policy, Volume 1, Number 1*, 19-30.
- Sujito, A. (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Indonesia Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila, Vol.3, No.2*, 13-32.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* . Jakarta: The Wahid Institute.

Website

- CNN Indonesia. (2023, Februari 14). *Anies Baswedan Respons Tuduhan Politik Identitas: Apa Ada Bukti?* Retrieved from CNNIndonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214173933-617-913018/anies-baswedan->

respons-tuduhan-politik-identitas-
apa-ada-bukti

- Mulyana, K. E. (2023, Januari 5). *Pengamat Nilai Kadar Politik Identitas di Indonesia Tidak Separah Amerika Serikat*. Retrieved from KompasTV: <https://www.kompas.tv/nasional/364997/pengamat-nilai-kadar-politik-identitas-di-indonesia-tidak-separah-amerika-serikat?page=all>
- Paat, Y. (2022, September 4). *Pemilih Khawatir dengan Hoax dan Politik Identitas di Pemilu 2024*. Retrieved from beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/news/972605/pemilih-khawatir-dengan-hoax-dan-politik-identitas-di-pemilu-2024>